

ABSTRAK

Ratna Yulia A.R. 2013, SKRIPSI. Judul: ” Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ”

Dosen Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CPA

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal (SPI), Prosedur Pemungutan dan Hambatan Dalam Pemungutan BPHTB

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Fokus penelitian ini adalah apakah prosedur pemungutan BPHTB sudah berjalan dengan baik atau tidak serta mengetahui efektivitas dalam pengendalian internal pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Kota Malang, yang meliputi beberapa pihak terkait dalam prosedur pemungutan BPHTB antara lain yaitu Dispenda, Wajib Pajak, Notaris/PPAT. Serta hambatan-hambatan dalam pemungutan BPHTB baik permasalahan secara umum yaitu kepada wajib pajak (WP) atau dari aparatur pemerintahan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara kepada Kasi Pengembangan Potensi dan petugas pendata dan verifikasi BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan kantor bagian Pengembangan Potensi Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemungutan BPHTB transaksi jual beli tanah dan bangunan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sejauh ini telah berjalan baik. Prosedur yang dilaksanakan pada implementasinya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian internal pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan sejak awal diberlakukannya BPHTB yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2012 terjadi pencapaian target hingga diatas 100%. Dispenda bisa lebih mengatakan target penerimaan BPHTB, karena target tersebut merupakan asset terbesar dari Dispenda Kota Malang. Adapun hambatan yang ditimbulkan dalam pemungutan BPHTB yaitu Kurangnya kerjasama antara masyarakat sebagai WP (wajib pajak) dengan Dispenda sebagai pemungut pajak, adanya manipulasi data yang dilakukan oleh WP, dan Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Dispenda.